

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kajian serta penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan juga pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) analisis dari:
 - a. Komunikasi dan kordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan PT. KPC dalam menjalankan implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi antara pemerintah daerah baik skpd satu dengan skpd lainnya, pemerintah daerah dengan PT.KPC ataupun sebaliknya. Selain itu komunikasi juga terjalin sangat baik, mulai dengan proses perencanaan, pelaksanaan program dan proyek, serta monitoring evaluasi antara PT.KPC dengan pihak-pihak terkait.
 - b. Sumber daya penunjang dalam implementasi program CSR yang dilakukan oleh PT.KPC dengan pemerintah daerah Kutai Timur, dengan melihat kebutuhan masyarakat akan jarak, kualitas serta kemudahan pelayanan kesehatan. Maka CSR yang diberikan oleh

PT.KPC selaku perusahaan yang ada di Kutai Timur ini membangun RSUD. Selain itu dalam prosesnya hal ini tentulah memerlukan sumber daya penunjang. Sumber daya penunjang ini dapat berupa tenaga kerja baik tenaga kerja profesional di bidang medis. Selain itu penunjang lainnya yang juga tidak kalah penting adalah fasilitas, peralatan, serta ruang rawat yang representatif.

- c. Disposisi dari PT.KPC dalam pembangunan RSUD sebagai implementator kebijakan. Pelimpahan proyek pembangunan RSUD dari pemerintah daerah Kutai Timur kepada PT.KPC dilakukan karena melebihi batas waktu target pembangunan rumah sakit. Selain itu setiap perusahaan juga wajib memberikan tanggung jawab sosial keada daerah. Oleh karena itu PT.KPC sebagai perusahaan yang berdiri di lingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Timur memeberikan atau mengambil alih proses pembangunan RSUD. Tanggung jawab sosial yang diberikan oleh PT.KPC ini juga disetujui melalui Surat Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 050/337/Bapp.XII/2003 pada tanggal 29 Desember 2003. Dalam tanggung jawab sosial yang diberikan PT.KPC kepada pemerintah daerah Kutai Timur ini mulai dari pendanaan, perancangan serta proses evaluasi.
- d. Struktur birokrasi dalam kebijakan yaitu penyesuaian prosedur kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Satuan kerja perangkat dinas di lingkup Kabupaten Kutai Timur yang juga ikut berperan dalam pembangunan RSUD Kudungga ini meliputi Dinas Kesehatan dan juga Dinas

Pekerjaan Umum. Selain itu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur melalui SK Bupati, Perbub serta koordinasi yang dilakukan juga menjadi salah satu penunjang serta mempercepat proses pembangunan RSUD ini.

2. Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembangunan RSUD melalui program CSR. Mengacu pada dalam konsen GCG dimana terdapat 3 aktor yang terlibat di dalamnya yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Setelah di analisis serta hasil dari observasi di lapangan dapat diidentifikasi aktor yang terlibat adalah pemerintah daerah yang meliputi Pemerintah Kabupaten, Bupati, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum. Aktor swasta yang terlibat dapat diidentifikasi menjadi 2 yaitu konsultan ahli yang dalam proses pembangunan ini adalah konsultan dari UGM kemudian juga media massa. Selain itu aktor yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat dimana masyarakatlah yang menjadi sasaran utama dari pelaksanaan pembangunan RSUD Kudungga ini.

B. Saran

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan beberapa saran dari peneliti antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PT.KPC dalam menjalin komunikasi dan koordinasi diharapkan lebih intensif lagi. Hal ini nantinya dapat sebagai forum dalam melakukan monitoring serta evaluasi dari program.
2. Penambahan fasilitas sarana infrastruktur ditambah seperti alat kesehatan, penunjuk jalan, serta akses baik jalan maupun akses komunikasi ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih baik. Selain itu diharapkan lebih sering melakukan pelatihan kepada tenaga medis baik dokter maupun perawat untuk lebih meningkatkan keahliannya.
3. Komitmen dari PT.KPC sebaiknya lebih ditambah, baik komitmen mengenai pendanaan, pembangunan serta perbaikan infrastruktur dari RSUD Kudungga. Selain itu hubungan antara PT. KPC dengan pemerintah daerah dijaga dengan baik dimana PT.KPC harus mengeluarkan tanggung jawab sosialnya dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.
4. Dibentuk satuan kerja bersama dari PT. KPC dengan pemerintah daerah maupun SKPD terkait guna keberlanjutan serta proses monitoring evaluasi yang khusus menangani kerjasama bantuan CSR dari PT.KPC.
5. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan RSUD seperti Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, PT. KPC, masyarakat, media massa, konsultan

ahli harus lebih berperan aktif dalam menjaga berlangsungnya program pelayanan kesehatan di RSUD Kudungga. Sehingga pelayanan kesehatan pada rumah sakit sudah tepat sasaran dan memenuhi standar yang telah ditetapkan bersama oleh aktor-aktor yang terkait.